

ABSTRACT

It has been nineteen (19) years of special autonomy imposed in the land of Papua. But the problem of education in Papua and West Papua is not something new to hear. Papua and West Papua still ranks 31 out of 34 provinces in Indonesia (BPS 2017). Policies to improve the quality of human resources of Papuans are an important part of the framework for bringing prosperity to all Indonesians. This study uses a descriptive qualitative method, Sugiono (2016). To see the results of the policy evaluation researchers used the theory of evaluation according to Willian N Dunn (in Suharno, 2010) on four (4) criteria namely; Efficiency; Effectiveness; Leveling out; Responsiveness. Research Results: 1. The education budget allocation of 20% of the APBD is only 13% which has been realized, around 7% that has not been implemented. 2. Undergraduate Scholarship Program, Teacher Welfare Program, and Dropout Rate Program, which is implemented by the City Government of Sorong, has been. But there is no clear budget transparency from the Government related to these education financing programs. 3. Every year around 200 indigenous Papuan students are given scholarships. Teacher welfare has been noted but is not guaranteed. Weak economic students are given tuition fees. 4. The implementation of the education funding program by the City Government of Sorong is still unknown by all Sorong city residents, lack of socialization, and there are programs that are still closed in nature.

Keywords: Evaluation, Funding, Quality of Education, Person Original Papua

ABSTRAK

Sudah sembilan belas (19) tahun Otonomi khusus diberlakukan di tanah Papua. Tetapi masalah pendidikan di Papua dan Papua Barat bukanlah hal yang baru didengar. Papua dan Papua Barat masih menempati peringkat 31 dari 34 provinsi di Indonesia (BPS 2017). Kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua adalah bagian penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. *Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Sugiono (2016)*. Untuk melihat hasil dari evaluasi kebijakan tersebut peneliti menggunakan teori evaluasi menurut Willian N Dunn (dalam Suharno, 2010) pada empat (4) kriteria yakni; *Efisiensi; Efektivitas; Perataan; Responsivitas*. Hasil Penelitian: 1. Alokasi anggaran pendidikan dari 20% APBD hanya 13% yang teralisasi, sekitar 7% yang belum terimplementasi. 2. Program Beasiswa Sarjana S-1, program Kesejahteraan Guru, dan program Penurunan Angka Putus Sekolah, yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Sorong, telah berjalan. Namun belum ada transparansi anggaran yang jelas dari Pemerintah terkait program-program pembiayaan pendidikan tersebut. 3. Setiap tahun sekitar 200 Mahasiswa Asli Papua diberi beasiswa. Kesejahteraan guru sudah diperhatikan namun belum terjamin. Para Siswa ekonomi lemah diberi bantuan Biaya SPP. 4. Penyelenggaraan program pembiayaan pendidikan oleh pemerintah Kota Sorong masih belum diketahui oleh seluruh masyarakat kota Sorong, kurang sosialisai, dan programnya masih ada yang bersifat tertutup.

Kata Kunci: Evaluasi, Pembiayaan, Kualitas Pendidikan, Orang Asli Papua